

B A B III

AGRESI BELANDA I DI PAMEKASAN

A. Usaha Belanda Kembali ke Indonesia

1. Dengan membonceng tentara Sekutu

Bangsa Indonesia telah berjuang untuk melenyapkan penjajahan selama berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Setelah Belanda menjajah Indonesia dengan penindasannya terhadap bangsa Indonesia, mereka dikalahkan dengan hina oleh Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 dan menyerah dengan tanpa syarat.¹

Setelah Indonesia dijajah oleh Jepang selama beberapa tahun tanpa diduga sedikitpun, akhirnya tentara Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945 dan pada waktu itu juga Jepang mengumumkan kealahannya.²

Sesudah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945, Indonesia dalam keadaan vakum kekuasaan, maka dari itu bangsa Indonesia dengan semangat yang tinggi berjuang untuk kemerdekaan negerinya. Dengan semangat juang tersebut, pada tanggal 17 Agustus 1945 atas nama Bangsa Indonesia Ir. Sukarno dengan didampingi Moh. Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indo-

¹Slamet Muljana, Nasionalisme Sebagai Modal Perjuangan Bangsa Indonesia, (Jakarta : PN. Balai Pustaka, 1969), II, hal. 98 - 99.

²Ibid., hal. 164.

nesia di Jl. Pegangsaan Timur Jakarta.³ Dengan pembacaan teks tersebut berarti bangsa Indonesia benar-benar berhak mengatur dan menentukan nasib bangsanya sendiri serta bebas dari penjajahan. Dengan kemerdekaan tersebut maka bangsa Indonesia merasakan kegembiraannya, karena saat yang dinanti-nantikan sudah tiba, maka seluruh bangsa Indonesia harus bersedia dan sanggup mengorbankan kepentingan masing-masing untuk kepentingan bangsa, yaitu menjaga, memelihara dan membela kemerdekaan nusa dan bangsa serta membangunnya.

Sedangkan tentara Jepang yang berada di Indonesia tidak mau menyerah kepada Republik Indonesia karena ada perintah dari pihak sekutu agar tentara Jepang tetap menjaga status-quo sejak Jepang menyerah.⁴ Oleh karena itu rakyat Indonesia memaksa tentara Jepang agar menyerah kepada RI., dan merampas senjatanya yang menimbulkan perlawanan dan pertempuran dengan pihak Jepang. Usaha bangsa Indonesia melucuti senjata tentara Jepang itu berhasil, kekuasaan dan senjata berada di tangan bangsa Indonesia.⁵ Sedangkan di Madura khususnya di Pamekasan pelucutan tentara Jepang tersebut tidak menimbulkan perlawanan dari pihak Jepang.⁶

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, Belanda

³Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoned Dan Nograho Notosusanto, (Editor), Sejarah Nasional Indonesia, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN. Balai Pustaka, 1975), VI, hal. 29.

⁴Ibid., hal. 31.

⁵Slamet Muljana, Op. cit., hal. 205.

⁶H. Ali Wafa, Bekas Lasykar Sabilillah, Prenduan Sumenep, dan K.H. Mudzhar, Bekas Lasykar Sabilillah Larangan Pamekasan, Wawancara, Pamekasan dan Sumenep, 9 dan 11 April 1986.

berusaha kembali ke Indonesia untuk menjajahnya, akan tetapi Belanda tidak mungkin dengan terang-terangan sebab Indonesia telah memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka. Namun demikian Belanda berusaha mengembalikan jajahannya di Indonesia dengan bersama-sama tentara Sekutu/Inggris yang akan mengurus penyelesaian tawanan perang dan interniran serta menjaga keamanan.⁷ Hal itu terbukti ketika tentara Sekutu mendarat di Jakarta pada tanggal 29 September 1945 di bawah pimpinan Let. Jend. Philip Christison sebagai panglima besar AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) yang akan melaksanakan perintah gabungan kepala staf Serikat Asia Tenggara di antaranya, adalah membebaskan tawanan perang dan interniran. Pendaratan tentara Sekutu tersebut disambut dengan sikap netral oleh pihak Indonesia. Namun demikian setelah diketahui bahwa di antara prajurit-prajurit Sekutu terdapat prajurit Belanda yang ikut membonceng dengan maksud jahatnya mempersenjatai orang-orang KNIL (Koninklijk Nederland Indisch Leger) yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang untuk mendirikan pemerintahan Sipil Hindia Belanda yang disebut NICA (Netherlands Indies Civil Administration).⁸ Maka sikap pihak Indonesia menjadi curiga, bahkan bermusuhan; terutama ketika Belanda memancing kerusuhan dengan cara provokasi sehingga situasi pada waktu itu bertambah buruk yang menimbulkan bentrokan dengan pihak Sekutu. Namun demikian usaha Belanda tersebut gagal.⁹

Tugas AFNEI itu rupanya telah diperhitungkan

⁷ Slamet Muljana, *Op. cit.*, hal. 206.

⁸ *Ibid.*, hal. 207.

⁹ Sartono Kartodirdjo, Marwati Juned dan Nograho Notosusanto, (Editor), *Op. cit.*, hal. 31 - 32.

oleh Philips Christison bahwa tidak akan berhasil, maka pimpinan AFNEI tersebut berunding dengan pemerintah Republik Indonesia dan pada tanggal 1 Oktober 1945 mengakui defacto Republik Indonesia. Untuk menghormati tugas-tugas AFNEI dan dengan adanya pengakuan tersebut serta penegasan Christison, bahwa tidak akan mencampuri persoalan ketatanegaraan Indonesia, maka masuknya tentara Sekutu ke wilayah Republik Indonesia diterima dengan tangan terbuka. Akan tetapi kenyataannya justru berbeda, pasukan-pasukan Sekutu tidak menghormati kedaulatan Indonesia yang mengakibatkan bentrokan-bentrokan bahkan pertempuran antara pasukan Sekutu dengan pihak Republik Indonesia di daerah-daerah yang didatangi Sekutu.¹⁰

Sekutu melanjutkan pendaratannya pada tanggal 13 Oktober 1945 di Padang, Bandung dan Medan serta tanggal 28 Oktober 1945 mendarat di Surabaya yang mengakibatkan pertempuran selama dua hari antara rakyat Surabaya dengan Sekutu. Setelah tentara Sekutu terdesak, Presiden Sukarno dan wakil Presiden Moh. Hatta serta Amir Syarifuddin datang ke Surabaya atas permintaan Philips Christison untuk mengadakan gencatan senjata.¹¹ Taktik pihak Sekutu itu berhasil dan dicapai kesepakatan gencatan senjata antara kedua belah pihak.

Gencatan senjata itu hanya berjalan selama dua hari, karena Sekutu melancarkan tembakan-tembakan dari arah laut. Rakyat Surabaya bertambah waspada dan siap siaga melawan Sekutu. Karena serangan dari pihak Sekutu,

¹⁰Ibid., hal. 32.

¹¹Slamet Muljana, Op. cit., hal. 208; dan Nograho Notosusanto, (Editor), Pertempuran Surabaya, (Jakarta : Mutiara Sumber Widya, 1985), hal. 58 - 61.

pertempuran dan pertumpahan darah tidak dapat dihindari yang menimbulkan banyak korban di antara kedua belah pihak sehingga mengakibatkan terbunuhnya Brigjen Mallaby. Maka dari itu pihak Sekutu bertambah marah dan pada tanggal 9 Nopember 1945 Sekutu memberi ultimatum kepada rakyat bahwa yang membunuh Mallaby harus menyerahkan diri paling lambat tanggal 10 Nopember 1945 jam 06.00, jika tidak menyerahkan diri maka Sekutu akan mengambil tindakan. Akan tetapi tidak seorang pun yang datang menyerahkan diri, karena rakyat Surabaya telah siap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Maka pada tanggal 10 Nopember 1945 kota Surabaya dihujani bom dan tembakan-tembakan oleh Sekutu, sedangkan rakyat tetap melayani serangan dan mempertahankan diri dengan mempergunakan senjata yang dimiliki serta dengan semangat juang yang menyala-nyala sehingga menimbulkan korban jiwa dan harta benda yang tak ternilai.¹²

Betapapun gigihnya perlawanan rakyat dan betapapun besarnya simpati dan bantuan yang mengalir dari berbagai kota di Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan RI., namun karena senjata yang dimiliki oleh rakyat bukan tandingan senjata modern yang dimiliki Sekutu, maka pertahanan rakyat berhasil dibobolkan. Rakyat mundur dari kota Surabaya dan kota Surabaya berhasil diduduki oleh musuh. Dengan bantuan Sekutu Belanda berhasil menduduki Indonesia dan membentuk pemerintahan Nica.¹³

Kedudukan Belanda makin hari makin kuat baik di Jakarta maupun kota-kota lainnya di Indonesia. Presiden

¹²S. T. Kansil dan Julianto, Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia, (Jakarta : Erlangga, 1983), hal. 47.

¹³Ibid.

dan wakilnya pindah ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946 karena di Jakarta tidak aman, dan pada tanggal itu juga pemerintah RI., pindah ke Yogyakarta. Dengan demikian Jakarta dikuasai Belanda dengan pemerintahan NICA-nya. Karena kedudukan Belanda makin hari bertambah kuat dan luas, maka kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang diserahkan oleh Sekutu kepada Belanda.¹⁴

Demikianlah keadaan yang terjadi di Indonesia setelah mendaratnya tentara Sekutu yang diwakili oleh Inggris, di mana mereka pada hakekatnya ingin menentang negara RI., dan membantu Belanda agar dapat menjajah kembali Indonesia yang merdeka. Akan tetapi bangsa Indonesia tidak tinggal diam, bahkan mereka berjuang dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan.

3. Dengan Deplomasi

Pemerintah RI., berusaha untuk menghindari pertentangan baik dengan pihak Sekutu maupun dengan Belanda. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa bangsa Indonesia adalah suatu bangsa yang cinta perdamaian. Karena itulah pemerintah RI., menggunakan perjuangan diplomatik agar tidak sampai terjadi konflik fisik yang akan mengakibatkan pertumpahan darah.

Pada uraian di atas telah disebutkan bahwa pendaratan tentara Sekutu di Indonesia adalah untuk mengurus dan melindungi tawanan perang serta melucuti dan mengembalikan tentara Jepang ke negerinya. Atas dasar inilah bangsa Indonesia tidak menghalangi pendaratan tentara Sekutu tersebut, bahkan diterima dengan senang

¹⁴Slamet Muljana, Op. cit., hal. 218 - 221.

hati. Akan tetapi kedatangan tentara Sekutu itu tidak sesuai dengan tugas sucinya, bahkan memberi peluang kepada Belanda untuk kembali menjajah RI., sehingga banyak kota besar yang dikuasai Sekutu diserahkan kepada Belanda, walaupun harus ditebus dengan pertumpahan darah dan harta benda. Setelah kota-kota besar banyak yang dikuasai Belanda, maka untuk menghindari pertentangan fisik antara pihak Belanda dan pihak Indonesia pemerintah RI., pada tanggal 1 dan 3 Nopember 1945 mengeluarkan sebuah maklumat politik, yaitu pemerintah RI menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintah RI., baik dari Sekutu maupun dari Belanda, dan RI., akan membayar hutang-hutang Hindia Belanda sebelum perang dunia II serta akan mengembalikan semua milik asing atau memberi ganti rugi milik asing yang telah dikuasai pemerintah RI. Di samping itu untuk membantu sarana perjuangan, pemerintah menyatakan akan membentuk partai-partai politik. Sebagai realisasi dari maklumat pemerintah, ditunjuklah Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri dan merangkap sebagai menteri luar negeri serta segera mengadakan kontak diplomatik dengan Belanda dan Inggris.¹⁵

Perundingan pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari 1946. Belanda mengajukan usul sebagai berikut :

- a. Indonesia akan dijadikan negara commonwelth berbentuk federasi ...
- b. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia, sedang urusan luar negeri diurus oleh pemerintah Belanda.
- c. Sebelum dibentuk commonwelth akan dibentuk pemerintah peralihan selama 10 tahun.
- d. Indonesia akan diusulkan sebagai anggota PBB.¹⁶

¹⁵Sartono Kartodirdjo, Marwati Djuned dan Nogroho Notosusanto, (Editor), Op. cit., hal. 33 - 34.

¹⁶Ibid., hal. 34.

Usul pihak Belanda tersebut jelas tidak menggem-birakan persatuan perjuangan, karena usul itu tidak mem-berikan pengakuan 100% terhadap kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu gabungan Persatuan Perjuangan yang di-prakarsai Tan Malaka melakukan oposisi terhadap Kabi-nit Syahrir dan menolak usul Belanda tersebut, karena mereka menganggap bahwa pemerintah terlalu banyak membe-rikan konsesi kepada Belanda, sedangkan mereka telah mengajukan hasil musyawarahnya yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1946 di Surakarta kepada pemerintah yang terdiri dari tujuh pokok :

- a. Perundingan atas pengakuan kemerdekaan 100%.
- b. Pemerintah rakyat.
- c. Tentara rakyat.
- d. Melucuti tentara Jepang.
- e. Mengurus tawanan bangsa Eropa.
- f. Menyita hak milik musuh.
- g. Menyita perusahaan dan pertanian milik musuh.¹⁷

Setelah diadakan sidang KNIP di Solo pada tanggal 28 Pebruari 2 Maret 1946 ternyata mayoritas suara menen-tang kebijaksanaan Syahrir. Dengan demikian Syahrir ja-tuh dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden. Akan te-tapi kemudian Presiden menunjuk Syahrir sebagai forma-tur kabinet dan kemudian dia menjabat lagi sebagai Per-dana Menteri yang dibentuk pada tanggal 12 Maret 1946.¹⁸ Kabinet Syahrir II ini mengajukan usul balasan kepada Belanda antara lain :

- a. RI harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas jajahan Hindia Belanda.
- b. Pinjaman-pinjaman Belanda belum tanggal 8 Ma-ret 1942 menjadi tanggung jawab pemerintah RI.

¹⁷Nogroho Notosusanto, A.S. Tambunan Soebijono dan Hidayat Mukmin, (Editor), Pejuang dan Prajurit, (Ja-karta : Sinar Harapan, 1984), hal. 49 - 50.

¹⁸Slamet Muljana, Op. cit., hal. 219.

- c. Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu, dan mengenai urusan luar negeri dan pertahanan diserahkan kepada suatu badan federasi yang terdiri dari orang-orang Indonesia dan Belanda.
- d. Tentara Belanda segera ditarik dari Indonesia dan jika perlu diganti dengan tentara RI.
- e. Pemerintah Belanda harus membantu pemerintah RI untuk dapat diterima sebagai anggota PBB.
- f. Sebelum perundingan berlangsung semua aksi militer harus dihentikan dan pihak Republik akan melaksanakan pengawasan terhadap pengungsian tawanan-tawanan Belanda dan interniran lainnya.¹⁹

Usul pihak Indonesia tersebut tidak diterima oleh pihak Belanda, bahkan Van Mook sebagai delegasi Belanda mengusulkan atas nama pribadinya sendiri mengakui RI., sebagai wakil Jawa untuk mengadakan kerja sama dalam rangka membentuk negara federal dan pasukan Belanda akan mengganti pasukan Sekutu. Sementara itu pihak Sekutu/Inggris dalam hal ini Clarkkerr menyatakan bahwa secara de facto RI., berkuasa atas Jawa dan Madura, sedangkan daerah lainnya perlu diadakan pemungutan suara.²⁰

Hasil perundingan antara pihak Indonesia yang diwakili oleh Sutan Syahrir dengan pihak Belanda yang diwakili oleh Van Mook dan pihak Inggris yang diwakili oleh Clark Kerr dilanjutkan di Hoge Veluwe Belanda dengan mengutus masing-masing delegasi. Delegasi Indonesia terdiri dari Mr. Suwandi, dr. Sudarsono dan Mr. A.K. Pringgodigdo. Sedangkan pihak Belanda terdiri dari Van Mook, Prof. Logemann, Dr. Idenburgh. Dr. Van Royen, Prof. Van Asbeck, Sultan Hamid dan Suryo Santoso. Pihak Inggris yaitu Clark Kerr. Di dalam perundingan yang dilaksana-

¹⁹Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened dan Ngoro Notosusanto, (Editor), Op. cit., hal. 220.

²⁰Ibid., hal. 36.

kan dari tanggal 14 sampai dengan 25 April 1946 ternyata menemui kegagalan, karena pemerintah Belanda menolak rancangan hasil perundingan antara Van Mook, Clark Kerr dan pihak Indonesia tersebut, terutama tentang pengakuan de facto RI., atas Sumatra, Jawa dan Madura oleh Clark Kerr.²¹

Pada tanggal 2 Mei 1946 Belanda mengusulkan usul baru kepada pemerintah RI., yang dibawa oleh Van Mook. Isinya terdiri dari tiga pokok, yaitu :

- a. Pemerintah Belanda mengakui Republik Indonesia sebagai bagian dari persemakmuran Indonesia yang berbentuk federasi.
- b. Persemakmuran Indonesia Serikat di satu pihak dengan Nederland, Surename dan Curacao di lain pihak akan merupakan bagian-bagian dari kerajaan Belanda.
- c. Pemerintah Belanda akan mengakui de facto kekuasaan atas Jawa, Madura dan Sumatra, dikurangi daerah-daerah yang dikuasai oleh tentara Inggris dan Belanda.²²

Usul Belanda tersebut setelah dipertimbangkan oleh Pemerintah RI., ternyata ditolak, karena dianggap sama dengan usul Belanda pada tanggal 10 Pebruari 1946 kecuali pada poin ketiga. Kemudian pemerintah RI., mengajukan usul balasan sebagai berikut :

- a. Republik Indonesia berkuasa de facto atas Jawa, Madura dan Sumatra, ditambah dengan daerah-daerah yang dikuasai oleh tentara Inggris dan Belanda.
- b. RI menolak ikatan kenegaraan dan menghendaki penghentian pengiriman pasukan-pasukan Belanda ke Indonesia.
- c. Pemerintah RI menolak suatu periode peralihan di

²¹Ibid., hal. 37.

²²Ibid.

bawah kedaulatan Belanda.²³

Usul balasan pihak RI., ini ditolak oleh Belanda. Sementara itu di dalam negeri RI., sendiri terjadi gejolak di mana Sutan Syahrir mendapat tantangan dari persatuan perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka karena program Kabinat Syahrir II ini antara lain akan meneruskan politik diplomasi dengan pihak Belanda sesuai dengan kebijaksanaan Sukarno Hatta yang tidak memuaskan kelompok Persatuan Perjuangan. Sedangkan kelompok Persatuan Perjuangan menginginkan konfrontasi total terhadap Belanda. Maka dari itu pemerintah mencurigai kelompok Persatuan Perjuangan yang menginginkan kedudukan dalam pemerintahan, lantas pemerintah menangkap Tan Malaka, Sukarni, Abi Kusumo, Sayuti Melik, Chairul Saleh dan Moh. Yamin. Selain itu pada awal bulan Juni 1946 di Solo timbul pergolakan di mana rakyat Solo menuntut agar pemerintahan kesunanan dihapus dan daerah Solo dinyatakan sebagai daerah Republik Indonesia yang berbentuk Kresidenan.²⁴ Sedangkan kelompok oposisi tetap bersikeras menentang Sutan Syahrir bahkan pada tanggal 27 Juni 1946 Perdana Menteri Syahrir bersama Ir. Darmawan Mangunkusumo, Dr. Sumitro dan Mayjen Sudibyo diculik oleh pengikut Tan Malaka.²⁵ Maka dari itu untuk sementara waktu Presiden mengambil alih kekuasaan dan menyatakan seluruh negara dalam keadaan bahaya serta menyerukan agar Sutan Syahrir dan kawan-kawannya yang diculik segera dikembalikan. Setelah adanya pernyataan dan seruan Presiden tersebut, pada tanggal 1 Juli 1946 Sutan Syahrir dan kawan-kawan-

²³Ibid.

²⁴Ibid., hal. 38 - 39.

²⁵Slamet Muljana, Op. cit., hal. 221.

nya dikembalikan dengan keadaan selamat.²⁶ Tetapi golongan anti Syahrir tetap berusaha menjatuhkan kabinat Syahrir. Hal ini terbukti dengan diajukannya susunan kabinat baru pada tanggal 3 Juli 1946 oleh kelompok anti Syahrir yang menghendaki agar pimpinan kabinat dipegang oleh Tan Malaka.²⁷ Tetapi Presiden menolak pengajuan tersebut dan Presiden bertambah yakin bahwa Tan Malaka dan kawan-kawannya betul-betul ingin berkuasa dan mengacaukan pemerintahan.

Walaupun Sutan Syahrir telah dikembalikan oleh penculik, namun pemerintahan tetap dipegang oleh Presiden, karena suasana dalam negeri tidak aman. Pergolakan politik dalam negeri adalah merupakan kesempatan yang baik bagi Belanda untuk melakukan tekanan politik dan militernya terhadap Indonesia. Tekanan politik yang dilakukan Belanda adalah dengan diadakannya konferensi Malino di Sulawesi selatan pada tanggal 15-25 Juli 1946 yang dihadiri oleh seluruh wakil-wakil daerah Riau daratan, Bangka Belitung dan daerah-daerah lain kecuali Sumatera, Jawa dan Madura dengan tujuan membentuk negara-negara bagian, sebagai tandingan terhadap pemerintah RI., yang berpusat di Yogyakarta dan supaya pemerintah RI., menerima bentuk negara federasi yang diusulkan oleh Belanda. Selain konferensi Malino juga diadakan konferensi Pangkalpinang pada tanggal 1 Oktober 1946 dan konferensi Denpasar pada tanggal 8 Desember 1946. Tekanan militer terus dilakukan oleh Belanda dengan mendatangkan pasukan-pasukannya ke Indonesia.²⁸ Akibat pergolakan

²⁶Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened dan Nograho Notosusanto, (Editor), Op. cit., hal. 39.

²⁷Slamet Muljana, Loc. cit.

²⁸Ibid., hal. 209 - 211.

politik dalam negeri dan tekanan dari pihak Belanda, perundingan terkatung-katung. Penundaan perundingan berarti memberi peluang kepada Belanda untuk menyusun kekuatannya.

Setelah keadaan politik pemerintahan RI., mulai normal kembali, maka pada tanggal 14 Agustus 1946 di samping Syahrir memang menjabat sebagai menteri luar negeri, juga ditunjuk sebagai formatur kabinet oleh Presiden.²⁹

Sikap Inggris setelah mengetahui bahwa Belanda dan Indonesia tetap bertikai, maka pada bulan Agustus 1946 Inggris mendelegir Lord Killearn ke Indonesia untuk menjadi penengah dan menemui Sutan Syahrir sebagai menteri luar negeri. Adapun pokok pembicaraan antara Killearn dan Sutan Syahrir ada tiga pokok yaitu :

- a. Masalah gerakan militer dan gencatan senjata ...
- b. Masalah RAPWI (Relief of Allied Prisoners of war and Internees).
- c. Masalah golongan minoritas. Indonesia berjanji tetap melindungi golongan minoritas.³⁰

Sebagai realisasi dari hasil pembicaraan tersebut, maka pada tanggal 17 September 1946 May. Jend. Sudibyo, Komodor S. Suryadarma, Kolonel M. Simbalon dan Kolonel T.B. Simatupang dikirim sebagai delegasi TRI untuk berunding dengan Sekutu guna mengadakan gencatan senjata. Dalam perundingan tersebut pihak RI., mengajukan nota yang terdiri dari :

- a. Gencatan senjata secara total di darat, laut dan

²⁹Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened dan Nograho Notosusanto, (Editor), Op. cit., hal. 40.

³⁰Ibid., hal. 40 - 41.

- b. Penghentian pemasukan tentara Belanda.
- c. Jaminan bahwa Sekutu tidak akan menyerahkan senjatanya kepada Belanda.³¹

Nota delegasi militer itu ditolak oleh Sekutu. Oleh karena itu perundingan mengenai gencatan senjata mengalami kegagalan.

Setelah Sutan Syahrir berhasil menyusun kabinet baru, maka pada tanggal 2 Oktober 1946 Kabinet Syahrir III dilantik, sedangkan Syahrir selain sebagai Perdana Menteri juga tetap sebagai Menteri luar negeri. Dan pada waktu itu juga Syahrir ditunjuk oleh Presiden sebagai ketua delegasi RI., dalam perundingan dengan pihak Sekutu dan Belanda. Anggota-anggotanya terdiri dari; Moh. Roem, A.K. Gani dan Susanto Tirtoprodjo. Anggota cadangan adalah, Amir Syarifuddin, Leimena dan Sudarsono.³² Dasar pokok perundingan adalah mengenai politik pemerintah yang terdiri dari :

- a. Perundingan atas dasar pengakuan negara RI., merdeka 100%.
- b. Mempersiapkan rakyat dan negara di segala lapangan, politik, militer, ekonomi dan sosial untuk mempertahankan RI.³³

Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Schermerhorn. Anggotanya adalah; Max Van Poll, F. de Boer dan Van Mook. Perundingan dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1946 di Jakarta yang dipimpin oleh Lord Killearn. Delegasi Belanda mengusulkan :

³¹ Saleh As'ad Djamhari, Ikhtisar Sejarah Perjuangan ABRI, Tahun 1945 - Sekarang, (Departemen Hankam, Pusat Sejarah ABRI, Cet. II, 1979), hal. 26.

³² Slamet Muljana, Op. cit., hal. 222.

³³ Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened dan Ngoroho Notosusanto, (Editor), Op. cit., hal. 42.

- a. Agar RI menerima masa peralihan, jika tidak, maka RI merupakan negara bagian.
- b. Agar RI memulihkan keamanan dan ketertiban.³⁴

Usul pihak Sekutu tersebut jelas tidak diterima oleh RI karena RI dianggap tetap dalam lingkungan Belanda. Dengan demikian perundingan ditunda. Kemudian pihak RI mengusulkan akan mengembalikan hak milik swasta Belanda. Dengan usulan RI tersebut, Belanda menyatakan akan berkonsultasi dengan pemerintahnya. Sementara perundingan mengenai politik pemerintahan dihentikan.³⁵

Selain Kabinet Syahrir III ini melangsungkan perundingan mengenai politik pemerintahan yang dihentikan untuk sementara waktu, juga melangsungkan perundingan mengenai gencatan senjata dengan pihak Sekutu dan Belanda sebagai kelanjutan dari perundingan gencatan senjata pada tanggal 17 September 1946. Perundingan ini dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 14 Oktober '46 dengan menghasilkan persetujuan, yaitu :

- a. Delegasi Indonesia, Inggris dan Belanda setuju mengadakan gencatan senjata atas dasar kedudukan pada saat itu.
- b. Akan dibentuk komisi yang bertugas mempertimbangkan dan memutuskan pelaksanaan gencatan senjata dan pengaduan-pengaduan terhadap pelanggarnya.
- c. Akan dibentuk sub komisi teknis, terdiri dari pada kepala staf Militer Indonesia, Inggris dan Belanda dengan tugas memberikan perintah pelaksanaan penghentian tembak-menembak.³⁶

Sedangkan pelaksanaan persetujuan tersebut baru diumumkan secara bersama pada tanggal 12 Pebruari 1947.

³⁴Ibid., hal. 43.

³⁵Ibid.

³⁶Saleh As'ad Djamhari, Op. cit., hal. 27.

Dengan adanya persetujuan antara pihak Republik Indonesia dengan Belanda tersebut, Panglima Besar Sudirman dalam pidato radionya berpendapat bahwa "...Sekalipun tercapai persetujuan penghentian tembak-menembak antara kedua belah pihak, tapi belum ada perintah penghentian tembak-menembak".³⁷ Jadi persetujuan mengenai gencatan senjata tersebut belum sampai pada tingkat pelaksanaan.

Untuk meneruskan perundingan politik antara pemerintah RI dan komisi Jenderal Belanda yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 1946 di Jakarta, maka perundingan diteruskan di Linggarjati pada tanggal 10 Nopember 1946, dan menghasilkan naskah persetujuan yang telah tersusun dan diparap serta diumumkan pada tanggal 15 Nopember 1946.

Isi pokok naskah perundingan tersebut adalah :

- a. Belanda mengakui kedaulatan de facto RI di seluruh Jawa, Madura dan Sumatra.
- b. Pemerintah Belanda dan RI akan bersama-sama membentuk suatu negara Indonesia yang berdaulat dan demokratis serta bersifat federal dengan nama negara Indonesia Serikat.
- c. Negara Indonesia Serikat dan kerajaan Belanda akan membentuk suatu uni yang dikepalai raja Belanda, dan akan bekerja sama dalam bidang luar negeri, pertahanan, keuangan, ekonomi dan budaya.
- d. Negara Indonesia Serikat dan uni harus terselesaikan sebelum tanggal 1 Januari 1949.
- e. Segera sesudah persetujuan, kedua belah pihak akan mengurangi kekuatan angkatan perang masing-masing.³⁸

Setelah Naskah Rencana Persetujuan Linggarjati

³⁷Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened dan Ngoro Notosusanto, (Editor), Op. cit., hal. 42.

³⁸A.H. Nasution, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, (Bandung : Angkasa, 1977), IV, hal. 188.

itu diparap oleh Sutan Syahrir sebagai ketua delegasi RI dan oleh Schermerhorn selaku ketua komisi jenderal yang mewakili Belanda untuk diratifikasi oleh parlemen masing-masing, maka timbul pro dan kontra dikalangan masyarakat Indonesia terhadap persetujuan tersebut. Partai-partai yang menentang terhadap persetujuan tersebut, antara lain adalah; Masyumi, PNI, BPRI, Angkatan Muda Wanita Rakyat, KRIS, Partai Rakyat, Barisan Banteng dan lain-lainnya, Golongan yang menentang ini bergabung dalam suatu kelompok yang bersama "Benteng Republik Indonesia".³⁹ Sedangkan alasan penolakan mereka itu adalah :

- a. Adanya perundingan antara Belanda dan RI mengakibatkan kerugian di pihak RI, Belanda terus mendaratkan pasukannya ke Indonesia.
- b. Hasil perundingan itu melanggar kedaulatan RI.
- c. Rakyat Indonesia masih mampu melawan Belanda lahir dan batin.
- d. Persetujuan tersebut tidak meyakinkan hidupnya RI sebagai negara politis dan ekonomi bisa terjamin.⁴⁰

Adapun golongan yang setuju terhadap persetujuan Linggarjati antara lain adalah, Partai Sosialis, Partai Komunis, Angkatan Muda Katolik Republik Indonesia (AMK-RI), Partai Katolik Republik Indonesia dan lain-lain dengan alasan, bahwa :

- a. Penerimaan Rencana Persetujuan Linggarjati tersebut merupakan suatu syarat perjuangan dalam

³⁹Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened dan Nogeroho Notosusanto, (Editor), Op. cit., hal. 44.

⁴⁰Slamet Mulyana, Op. cit., hal. 226.

menyelesaikan resolusi nasional.

- b. Untuk mencapai kemerdekaan 100%, harus diperoleh dengan tahap demi tahap.⁴¹

Untuk menghindari konflik terutama di antara angkatan perang, maka pada tanggal 21 Nopember 1946, Panglima Besar Jenderal Sudirman mengingatkan kepada seluruh angkatan perang agar tidak memikirkan masalah perundingan dan jangan bertindak sendiri-sendiri.⁴² Karena kewajiban angkatan perang sebagai tulang punggung negara, adalah memperkuat dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara.

Pertentangan antara pro dan kontra terhadap Rencana Persetujuan Linggarjati berjalan terus. Sedangkan pemerintah RI menginginkan agar Rencana Persetujuan Linggarjati tersebut diterima oleh KNIP. Untuk itu Presiden pada bulan Desember 1946 mengeluarkan peraturan No.6/1946 yang bertujuan untuk menambah anggota KNIP. Maka pada tanggal 30 Desember 1946 keluarlah Maklumat Presiden yang berisi susunan anggota KNIP yang baru dengan jumlah 514 orang. Sedangkan anggota KNIP yang lama berjumlah 282 orang ditambah yang baru sebanyak 232-orang menjadi 514 orang. Kebanyakan anggota KNIP itu mendukung terhadap Rencana Naskah Persetujuan Linggarjati.⁴³

Rencana Naskah Persetujuan Linggarjati yang telah diparap tersebut dibawa ke sidang KNIP yang dilaksanakan di Malang pada tanggal 25 Pebruari 1947 untuk mendapat pengesahan. Ternyata walaupun di dalam sidang mengalami

⁴¹Ibid., hal. 225.

⁴²Shaleh As'ad Djamhari, Op. cit., hal. 27.

⁴³Nogroho Notosusanto, A.S. Tambunan, Soebijono dan Hidayat Mukmin, (Editor), Op. cit., hal. 57.

perdebatan yang hebat, naskah itu dapat lolos dan disahkan oleh KNIP. Akhirnya pada tanggal 25 Maret 1947 Naskah Persetujuan Linggarjati ditanda tangani oleh ketua delegasi Indonesia dan ketua delegasi Belanda.⁴⁴

Demikianlah Naskah Persetujuan Linggarjati telah disahkan dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Jika dilihat dari sudut perjuangan bangsa Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 perjanjian Linggarjati itu merupakan kekalahan bagi bangsa Indonesia, karena :

- a. Indonesia oleh Belanda diakui berkuasa de facto atas Jawa, Madura dan Sumatra.
- b. Republik Indonesia akan menjadi negara bagian dari negara serikat Indonesia.

Akan tetapi jika dilihat dari sudut kedudukan internasional perjuangan bangsa Indonesia telah diakui oleh Belanda dan dunia. Dengan adanya pengakuan tersebut perjuangan bangsa Indonesia sudah berdasarkan hukum.

Setelah persetujuan Linggarjati ditanda tangani, hubungan antara Republik Indonesia dengan Belanda tidak bertambah baik, bahkan sebaliknya; karena adanya perbedaan interpretasi mengenai pelaksanaannya. Belanda mengajukan bermacam-macam tuntutan terhadap Republik Indonesia yang bersifat ultimatif yang harus dijawab oleh pemerintah Republik Indonesia dalam waktu dua minggu terhitung mulai tanggal 27 Mei 1947. Ultimatum itu berisi :

- a. Membentuk pemerintahan peralihan bersama.
- b. Mengeluarkan uang bersama, yang nilainya terhadap uang asing ditentukan oleh suatu badan yang dibentuk bersama.

⁴⁴Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened dan Ngoro Notosusanto, (Editor), Op. cit., hal. 45.

- c. Menuntut pengiriman beras ke daerah di luar Jawa dan Madura yang kekurangan bahan makanan.
- d. Menyelenggarakan ketertiban dan keamanan dengan bantuan pihak Belanda di seluruh wilayah Indonesia.
- e. Menyelenggarakan ekspor dan impor bersama.⁴⁵

Dengan adanya ultimatum tersebut, maka pada tanggal 8 Juni 1947 Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan balasannya yang terdiri dari :

- a. Setuju membentuk bersama pemerintahan interim nasional, yang berkewajiban mempersiapkan sidang konstituante dan penyerahan kekuasaan dari pemerintah Hindia Belanda kepada pemerintah federal Indonesia. Selama masa peralihan tidak akan dan tidak boleh dikurangi kedudukan de facto Republik. Republik akan mengakui terbentuknya pemerintahan Indonesia Timur dan pemerintah Borneo.
- b. Setuju membentuk lembaga deviezen bersama untuk seluruh Indonesia, sesudah terbentuk pemerintah peralihan.
- c. Hendaknya disusun badan pusat pembagian makanan untuk seluruh Indonesia oleh pemerintah peralihan.
- d. Penjaminan keamanan dan ketertiban di wilayah Republik adalah kewajiban polisi Republik sendiri.
- e. Perdagangan ekspor dan impor supaya dijalankan menurut petunjuk-petunjuk pemerintah peralihan.
- f. Soal-soal besar mengenai penyelenggaraan perjanjian Linggarjati supaya diurus oleh kedua delegasi. Keputusan-keputusannya dijalankan oleh pemerintah peralihan dan negara-negara bagian.⁴⁶

Konsesi yang diberikan pihak Republik Indonesia kepada Belanda dianggap tidak memuaskan Belanda, bahkan pihak Republik dianggap melolak isi nota komisi jenderal dan untuk selanjutnya Belanda memutuskan :

Mereka (pihak Republik) tidak memperhatikan kedudukan hukumnya sebagaimana telah diterimanya dalam perundingan Linggarjati; mereka menganggap Re-

⁴⁵ Slamet Muljana, Op. cit., hal. 232 - 233.

⁴⁶ A.H. Nasution, Op. cit., Jilid V, hal. 20.

publik mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dalam segala hal terhadap susunan federal; mereka menolak dasar kerja sama yang harus ada dalam keadaan dimana semua pihak mempunyai hak dan mereka juga tidak memberikan jaminan atas keamanan sesungguhnya serta atas hak kembalinya orang-orang yang dulu menyingkir dari daerah Republik, atau dalam hal kedudukan orang-orang yang telah bekerja sama dengan pemerintah Hindia-Belanda. Karena itu komisi jenderal berpendapat, bahwa nota pihak Republik itu tidak memberikan kemungkinan kepadanya untuk mengadakan perundingan lebih lanjut, dan berhubung dengan ini menutup isi notanya dengan mengajukan persoalan apa yang akan terjadi selanjutnya kepada pemerintah Belanda.⁴⁷

Maka pada tanggal 20 Juni 1947 Komisi Jenderal menjawab nota balasan Republik tertanggal 8 Juni 1947 yang berisi bahwa nota balasan Republik dianggap menolak dasar-dasar Persetujuan Linggarjati dan menolak kerjasama sebagaimana termaktub dalam Persetujuan Linggarjati.⁴⁸ Selain itu pada tanggal 23 Juni 1947 telah datang keputusan Kabinet Belanda yang disampaikan oleh H.J. Van Mook kepada Perdana Menteri Syahrir sebagai delegasi Republik yang isinya agar Republik menerima nota komisi Jenderal tertanggal 27 Mei 1947. Keputusan Kabinet Belanda itu disampaikan oleh Syahrir kepada pemerintah Republik.⁴⁹ Sementara itu di dalam negeri (Republik) sendiri timbul reaksi dari partai-partai politik dan organisasi rakyat di antaranya Masyumi, PNI, dan BPRI menolak terhadap nota Komisi Jenderal Belanda tanggal 27 Mei 1947.⁵⁰

⁴⁷Ibid., hal. 23.

⁴⁸Ibid., hal. 28 - 29.

⁴⁹Slamet Muljana, Op. cit., hal. 234.

⁵⁰Ibid., hal. 235.

Dengan adanya jawaban dan penolakan terhadap nota Komisi Jenderal tersebut, maka pada tanggal 25 sampai dengan 26 Juni 1947 kabinet bersidang membicarakan tuntutan Belanda. Sutan Syahrir sebagai ketua delegasi dan Perdana Menteri dimintai pertanggung jawaban dan penjelasannya mengenai segala kebijaksanaannya sejak persetujuan Linggarjati disyahkan yang menimbulkan perbedaan interpretasi antara pihak Republik dengan pihak Belanda. Dengan demikian sidang Kabinet menjadi panas dan tegang. Amir Syarifuddin sebagai pimpinan sayap kiri tidak menyetujui kompromi terhadap Komisi Jenderal, karena tidak menjamin persatuan antara pemerintah Republik dan rakyat yang mayoritas menolak terhadap persetujuan Linggarjati. Akibat tindakan Amir Syarifuddin tersebut, maka Kabinet Syahrir III jatuh dan Syahrir menyerahkan mandatnya kepada Presiden.⁵¹

Setelah Sutan Syahrir menyerahkan mandatnya, maka pada waktu itu juga Presiden mengundang pemimpin-pemimpin partai dan organisasi rakyat untuk memabahas Kabinet Syahrir. Hadir dalam perundingan itu antara lain : Dr. Sukiman dari Masyumi, Ali Sastro Amijoyo dari PNI, Tambunan dari Parkindo, Moruto Darusman dari PKI, Sentral dari Partai Katolik Indonesia, Tan Ling Jie dari Sosialis, Krissubanu dari Pesindo, Trimurti dari Partai Buruh Indonesia, Sakirman dari lasykar rakyat dan Haryono dari Sobsi. Semua pimpinan partai dan organisasi yang hadir dalam sidang tersebut menyetujui pembubaran Kabinet Syahrir dan membentuk Kabinet Presidentil, dan sejak itulah kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Presiden. Pada waktu itu juga datang peringatan dari Belanda yang isinya agar pemerintah Republik pada tanggal

⁵¹A.H. Nasution, Op. cit., hal. 37 - 39.

27 Juni 1947 dapat menjawab nota balasan Belanda tertanggal 23 Juni 1947. Dengan demikian, maka pada waktu itu juga dibentuk Komisi yang terdiri dari Amir Syarifuddin, Harsono, Cokroaminoto, Tambunan, Kasimo dan Sujono Hadinoto untuk membantu Presiden dalam menyusun jawaban atas nota Belanda tersebut.⁵²

Usaha tersebut berhasil dan dibuatlah nota jawaban terhadap Belanda yang ditanda tangani oleh Presiden sendiri tertanggal 27 Juni 1947 untuk disampaikan kepada Belanda yang isinya antara lain :

1. ... kami dengan gembira dapat menarik kesimpulan bahwa tentang urusan pemerintah peralihan telah ada persetujuan. Untuk memberi gambaran, pemerintah Republik mengemukakan di sini pokok pikiran yaitu :
 - a. ... mengenai penyelenggaraan persetujuan Linggarjati diurus oleh kedua delegasi.
 - b. Pemerintah peralihan dibentuk secepat mungkin, sedangkan tidak ada keberatan bahwa dalam pemerintah peralihan itu duduk wakil kerajaan Belanda.
 - c. Kekuasaan dari pemerintah de facto Republik dilakukan sepenuhnya oleh alat-alat kekuasaan Republik.
2. ... jika pemerintah Belanda bermaksud menyerahkan jaminan untuk keamanan dan ketertiban dalam daerah Republik pada gadarmeri bersama, maka pemerintah Republik tidak dapat menerima itu, meskipun pemerintah Republik bersedia bekerja sama dalam hubungan federal, pun juga dalam lapangan jaminan keamanan dalam negeri ...
3. Dengan mengindahkan apa yang tersebut di atas, maka pemerintah Republik ingin menyatakan lagi kesediaannya turut serta dalam penghapusan garis-garis demarkasi dan pengunduran pasukan-pasukan ke garnisunnya masing-masing.⁵³

⁵²Ibid., hal. 39 - 42.

⁵³Ibid., hal. 41.

Jawaban pemerintah Republik yang ditanda tangani oleh Presiden Soekarno tersebut tetap tidak memuaskan pihak Belanda. Oleh karena itu pada tanggal 29 Juni 1947 Van Mook mengirim nota balasan kepada pemerintah Republik yang harus dijawab dalam waktu satu minggu. Isi nota balasan tersebut adalah mengenai :

1. Kedudukan wakil mahkota di dalam pemerintahan peralihan
2. Hubungan luar negeri
3. Alat-alat kekuasaan federal
4. Pengembalian milik asing
5. Soal keamanan dalam negeri.⁵⁴

Di samping Belanda menekan Republik yang bersifat ultimatif, juga melancarkan serangan-serangan dan mengorganisir perampokan-perampokan di daerah Republik untuk mengacaukan keamanan dan menekan Republik agar menerima semua tuntutananya, seperti yang terjadi di Jakarta, Medan, Surabaya, Bandung dan daerah-daerah lainnya.⁵⁵

Sementara itu pada tanggal 30 Juni 1947 Presiden Soekarno menunjuk Amir Syarifuddin, A.K. Gani dan Setiajid sebagai formatur untuk membentuk Kabinet Nasional dan harus selesai tanggal 1 Juli 1947. Akan tetapi mereka tidak berhasil membentuk Kabinet baru itu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Presiden, karena semua partai menyalahkan konsesi Syahrir terhadap Belanda. Kemudian pada tanggal 2 Juli 1947 Presiden menunjuk Amir Syarifuddin, A.K. Gani dan Setiajid untuk yang kedua kalinya membentuk Kabinet Nasional. Akhirnya pada tanggal 3 Juli 1947 Kabinet Nasional terbentuk di bawah pimpinan Amir Syarifuddin dengan mendapat tugas

⁵⁴Ibid., hal. 47

⁵⁵Ibid., hal. 51 dan 61.

untuk menjawab nota Belanda tertanggal 24 Juni 1947 yang dikirim oleh Van Mook.⁵⁶

Dengan adanya tugas tersebut, maka pada tanggal 8 Juli 1947 pemerintah Republik menyampaikan nota balasan kepada Van Mook di Jakarta yang isi pokoknya adalah :

Pemerintah Republik menyetujui kedudukan wakil mahkota dalam pemerintahan peralihan, dengan kekuasaan de jure untuk memutuskan. Juga pemerintah Republik menyetujui bahwa selama peralihan, soal-soal perhubungan dengan luar negeri harus disesuaikan dengan perlanjutan keadaan, bahwa pemerintah Belanda adalah berdaulat selama masa peralihan. Akan tetapi, pemerintah Republik berkehendak, bahwa perhubungan yang telah terdapat antara Republik dan negara-negara asing, akan disesuaikan dengan rencana, sebagaimana telah dikemukakan dalam nota Komisi Jenderal tanggal 27 Mei yang lalu.

Juga pemerintah Republik menyetujui usul-usul Komisi Jenderal tentang pembentukan alat-alat pemerintah federal. Sesuai dengan pasal 14 persetujuan Linggarjati, perusahaan-perusahaan kepunyaan asing akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Terhadap soal badan kepolisian bersama masih terdapat perbedaan pendapat antara pendirian Belanda dan Republik. Akan tetapi pemerintah Republik menyetujui pembentukan suatu direktorat untuk keamanan dalam negeri. Soal kepolisian dari negara-negara bagian hanya dapat diselenggarakan oleh daerah-daerah bahagian tersebut sendiri.⁵⁷

Pada hakekatnya jawaban pemerintah Republik tersebut sudah hampir memenuhi semua tuntutan Belanda tanggal 27 Mei 1947, hanya mengenai gandermeri bersama yang tetap ditolak oleh Republik. Akan tetapi pihak Belanda tetap tidak puas terhadap jawaban pemerintah Republik tersebut, bahkan Perdana Menteri Beel dalam pidatonya

⁵⁶Ibid., hal.48 - 50.

⁵⁷Ibid., hal. 54.

tetap mengancam Republik bahwa dia akan mengerahkan kekuatan militernya sebagai tindakan terakhir terhadap Republik. Selain itu pihak Belanda dalam hal ini Van Mook menuduh, bahwa Republik menghasut Belanda dan melanggar gencatan senjata serta mengadakan blokade makanan terhadap kota-kota yang diduduki Belanda.⁵⁸

Tuduhan-tuduhan pihak Belanda tersebut adalah merupakan usaha Belanda untuk melancarkan agresinya dan Belanda yakin akan kemenangannya, karena apabila Belanda memberi tekanan atau ultimatum, maka Republik memberi konsepsi dan Belanda dengan militernya sudah merasa kuat untuk melancarkan agresi terhadap Republik.

Dengan pernyataan dan tuduhan dari pihak Belanda tersebut, maka tanggal 14-15 Juli Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan A.K. Gani serta Setiajid (keduanya sebagai wakil Perdana Menteri) bersidang dengan Van Mook di Jakarta membicarakan gendarmerie bersama. Sidang tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, baik mengenai gendarmerie bersama atau penyelesaian di garis demarkasi, bahkan Belanda menambah tuntutan supaya Republik segera menghentikan permusuhan terhadap Belanda. Tuntutan itu disambut baik oleh Republik asalkan kedua belah pihak sama-sama menghentikan permusuhan, karena permusuhan itu berasal dari kedua belah pihak. Akan tetapi Belanda tetap menolak usul Republik tersebut. Selanjutnya Belanda mengusulkan agar penghentian permusuhan hanya dilakukan oleh pihak Republik.⁵⁹

Dengan usul tersebut jelaslah sudah bahwa Belanda memang tidak ingin menyelesaikan sengketa dengan Republik

⁵⁸Ibid., hal. 56.

⁵⁹Slamet Muljana, Op. cit., hal. 238.

itu secara damai. Hal itu terbukti dengan usul-usul/ ultimatum Belanda terhadap Republik, terutama mengenai usul Belanda yang terakhir itu, yang jelas pihak Republik tidak akan menerimanya. Karena usul Belanda tetap ditolak oleh pihak Republik, maka pada tanggal 15 Juli 1947 Belanda menyampaikan usul untuk yang sekian kalinya, yaitu :

"... pembentukan direktorat bersama keamanan dalam negeri dan tentang penghentian permusuhan. Pihak Belanda menghendaki pembentukan direktorat keamanan yang stafnya terdiri dari orang-orang Belanda dan wakil-wakil negara bagian. Direktorat bekerja di bawah kekuasaan Pemerintah Peralihan. Direktorat keamanan menentukan di mana korps polisi istimewa akan ditempatkan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban. ... pihak Republik memerintahkan penghentian permusuhan selambat-lambatnya tanggal 16 Juli 1947 jam 23.59.⁶⁰

Karena pihak Republik belum menjawab usul Belanda sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan, maka pada tanggal 17 Juli 1947 Belanda semakin garang menekan Republik agar usulnya itu dijawab dan disusul dengan perintah menghentikan semua propaganda anti Belanda serta tentara Republik pada tanggal 21 Juli 1947 harus sudah mundur sampai jarak 10 kilometer dari batas daerah pendudukan tentara Belanda untuk diganti tentara Belanda dan polisi keamanan.⁶¹

Dengan adanya tekanan dari pihak Belanda tersebut, maka pada tanggal 17 Juli itu juga pemerintah Republik menjawab usul Belanda yang bersifat menekan itu sebagai berikut :

a. Pihak Republik menghendaki supaya direktorat ke-

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid., hal. 238.

amanan di samping alat-alat Republik mendapat hak dari pemerintah peralihan untuk menentukan kapan dan di mana daerah Republik akan ditempatkan korps polisi istimewa.

- b. Urusan keamanan dan ketertiban dalam negeri semata-mata kewajiban polisi dari masing-masing negara bagian.⁶²

Jawaban pihak Republik itu ditolak oleh Belanda, karena tuntutan Belanda tidak semuanya diterima oleh pihak Republik terutama mengenai gandermerie bersama. Sengketa antara Republik dengan Belanda itu tidak dapat diselesaikan di meja perundingan yang memang disengaja oleh Belanda. Hal ini terbukti selama dalam perundingan pihak Republik telah banyak menerima usul-usul Belanda, akan tetapi dibalik itu Belanda tetap menekan Republik dan terus mendaratkan militernya di daerah Republik dengan maksud menyusun kekuatan untuk selanjutnya menyerang Republik.

3. Dengan Agresi

Sengketa antara Belanda dengan Republik Indonesia tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi, walaupun berkali-kali diadakan perundingan antara kedua belah pihak. Sementara itu perundingan yang diadakan di Linggarjati yang telah mendapat persetujuan dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, dalam pelaksanaannya menimbulkan perbedaan penafsiran, antara kedua belah pihak, dan akhirnya Belanda mengajukan usul-usul yang tidak sesuai dengan persetujuan Linggarjati dan bersifat ultimatif dengan tujuan agar Republik menuruti kehendak Belanda.

⁶²Ibid., hal. 239.

Selama perundingan berlangsung antara kedua belah pihak, Belanda terus mendaratkan militernya sebagaimana tersebut dalam pembahasan terdahulu, bahkan pada tanggal 12 dan 14 Juli 1947 kapal perang Belanda menembaki daerah pantai Banyuwangi, kemudian pada tanggal 17 Juli 1947 Belanda menembaki daerah Bandung dengan melalui pesawat udaranya, sehingga banyak penduduk yang menjadi korban. Demikian juga di daerah-daerah lain.⁶³

Setelah Belanda merasa kuat dengan pasukan militernya yang telah mengepung dan memblokade Republik serta pihak Republik tetap tidak menuruti semua kemauan Belanda, terutama masalah gandermerie bersama, maka pada tanggal 21 Juli 1947 dini hari Belanda melancarkan aksi militernya yang terkenal dengan agresi Belanda I ke seluruh wilayah Republik Indonesia dengan menggerakkan seluruh devisinya. Dalam hal ini Drs. Saleh As'ad Djamhari menulis dalam bukunya "Ikhtisar Sejarah Perjuangan Abri" sebagai berikut :

Pada tanggal 21 Juli 1947 jam 00.00 Belanda melancarkan aksi militernya ke seluruh wilayah RI. Divisi "7 Desember" bergerak dari Jakarta ke Jawa Barat. Divisi B bergerak dari Bandung ke Cirebon, Semarang, Tegal, Purwokerto dan Cilacap. Dari Semarang Brigade T Divisi B bergerak ke beberapa Kresidenan di Jawa Tengah. Divisi A bergerak dari Surabaya ke seluruh Jawa Timur. Di Sumatra Brigade Z bergerak dari Medan ke seluruh Sumatra Timur. Di Padang Brigade U dan Palembang Brigade Y.⁶⁴

Serangan pendudukan yang didukung oleh senjata yang modern pada waktu itu, walaupun mendapat perlawanan yang gigih dari TNI dan rakyat jelata dengan senjata yang tidak sebanding dengan musuh, maka Belanda dengan

⁶³A.H. Nasution, Op. cit., hal. 72 dan 75.

⁶⁴Saleh As'ad Djamhari, Op. cit., hal. 28.

cepat dapat menguasai sebagian besar kota-kota wilayah RI. Dengan adanya serangan pendudukan tersebut, maka Panglima Besar Jenderal Sudirman berkata antara lain :

Sekarang tiba saatnya bagi segenap lapisan rakyat Indonesia untuk menunaikan sumpahnya terhadap Tuhan dan Ibu Pertiwi, menjalankan dengan sungguh-sungguh semboyan-semboyan cinta kemerdekaan. Kemerdekaan yang telah kita proklamasikan dan kita pertahankan selama 22 bulan lebih, wajib kita lindungi dan kita pertahankan sampai titik darah yang penghabisan. Insaf dan ingatlah ! Korban telah banyak, penderitaan tidak sedikit, maka jangan sekali-kali kemerdekaan negara dan bangsa Indonesia yang telah kita miliki dan kita pertahankan itu, kita lepaskan dan kita serahkan kepada siapapun juga.⁶⁵

Dengan adanya anjuran dari Panglima Besar tersebut, maka TNI, semua badan-badan Kelasykaran serta rakyat menyambut dengan baik dan bersatu kembali untuk melawan Belanda serta menahan kemajuan tentaranya. Hal itu terbukti dengan dibentuknya pusat-pusat kekuatan di desa-desa dan pengrusakan jalan-jalan serta jembatan jembatan untuk menghambat perluasan daerah musuh dan melawannya dengan senjata yang serba sederhana.⁶⁶ Akan tetapi karena persenjataan yang dimiliki oleh para pejuang jauh tidak seimbang, hanya didorong oleh semangat yang bernyala-nyala untuk menentang penjajahan, maka dalam waktu yang tidak lama Belanda mencapai kemajuan. Walaupun Belanda telah mencapai kemajuan khususnya ke kota-kota wilayah Republik, para pejuang terus melancarkan gangguan-gangguan dan perlawanan sehingga Belanda banyak mengalami kerugian.

Serangan-serangan Belanda itu segera menarik per

⁶⁵ Slamet Muljana, *Op. cit.*, hal. 241.

⁶⁶ Saleh As'ad Djamhari, *Op. cit.*, hal. 29.

hatian dunia setelah mendapat kecaman dari beberapa negara dan diusulkan agar Perserikatan Bangsa-bangsa segera membicarakan hal itu dan cepat mengambil tindakan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Kemudian Dewan keamanan PBB bersidang dan memutuskan agar kedua belah pihak segera menghentikan tembak-menembak untuk mengadakan perundingan dengan cara yang damai.⁶⁷ Untuk melaksanakan keputusan PBB tersebut, maka pada tanggal 4 Agustus 1947 Presiden Sukarno dan Jenderal Spoor memerintahkan agar kedua belah pihak menghentikan tembak-menembak.⁶⁸ Guna mengawasi penghentian tembak-menembak itu, maka dibentuklah komisi konsuler yang akan melapor kepada PBB tentang pelaksanaan penghentian tembak-menembak tersebut.⁶⁹ Akan tetapi sekalipun telah ada resolusi PBB, nyatanya Belanda terus melancarkan agresinya dan berusaha merebut daerah kekuasaan RI., seluas mungkin.⁷⁰ Untuk mengakhiri konflik antara kedua belah pihak tersebut, maka PBB membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia dan Belgia.⁷¹ Namun demikian Belanda tetap melancarkan agresinya ke kota-kota daerah Republik.

Dengan tugas yang diberikan oleh PBB kepada KTN itu, beserta kekuasaan yang ada padanya, kedua belah pihak bisa diajak ke meja perundingan yang dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan berakhir tanggal 17 Januari

⁶⁷ Slamet Muljana, Op. cit., hal. 242.

⁶⁸ Saleh As'ad Djamhari, Loc. cit.

⁶⁹ Sartono Kartodirdjo, Marwati Djoened dan Ngoro Notosusanto, (Editor), Op. cit., hal. 49.

⁷⁰ Saleh As'ad Djamhari, Op. cit., hal. 30.

⁷¹ Ibid.

1948 di sebuah kapal "Renville" milik Amerika Serikat.⁷² Kemudian sidang itu menghasilkan keputusan yang terkenal dengan "Peretujuan Renville".

B. Belanda Menduduki Pamekasan

1. Pendaratan Belanda di Pantai Selatan Pamekasan

Kota-kota besar di wilayah Republik Indonesia hampir semuanya diduduki oleh tentara Belanda, tidak ketinggalan juga kota Surabaya sebagai kota Propinsi Jawa Timur telah menjadi sarang tentara Belanda. Dari Surabaya Belanda berusaha mengembangkan daerah kekuasaannya ke seluruh Jawa Timur, dan sejak itu pula Madura dinyatakan dalam keadaan bahaya perang. Komandan TNI di Madura adalah Resimen 33 yang merupakan bagian dari Resimen Surabaya yang dipimpin oleh Let.Kol. Chandra Hasan yang berkedudukan di Pamekasan.⁷³

Setelah Madura dinyatakan dalam keadaan bahaya perang, maka Chandra Hasan memerintahkan agar semua sektor Komandan baik militer maupun sipil dan semua badan-badan kelasykaran bersenjata mengkoordinasikan semua kegiatan dan kekuatannya masing-masing, dan apabila dalam keadaan yang mendesak dan darurat, maka Komandan Sektor hendaknya bertindak cepat dan selanjutnya segera melaporkan kepada Komandan Resimen 33 di Pamekasan.⁷⁴ Dalam hal ini K.H. Abd. Adhim Ening ketika diwawancarai mengatakan "Semua Badan Kelasykaran diperintahkan oleh

⁷²Slamet Muljana, Op. cit., hal. 250.

⁷³KODAM VIII Brawijaya, Sam Karya Bhirawa Anoraga, (Surabaya : SEMDAM VIII Brawijaya, [t.th/]), hal. 72 dan 115.

⁷⁴Abd.Rahman, Purnawirawan Polisi, dan Ex Polisi Istimewa, Wawancara, Pamekasan, 9 April 1986.

Chandra Hasan untuk siap siaga menghadapi serangan dari Belanda".⁷⁵ K.H. Mohammad Tamim juga mengatakan "Sebelum Belanda menyerang ke Madura, Lasykar Sabilillah diperintahkan untuk siap-siap melawan Belanda".⁷⁶ Selain itu K.H. Syarqawi mengatakan "Untuk menghadapi serangan Belanda semua badan-badan Kelasykaran dan rakyat diperintahkan untuk merintangai jalan-jalan dengan menebang pohon-pohon dan memutus jembatan-jembatan serta diadakan penjagaan yang ketat di pantai selatan Madura".⁷⁷ Dengan keterangan tersebut di atas jelas bahwa rakyat Madura dan semua badan-badan Kelasykaran serta TNI betul betul siap menghadapi serangan Belanda, meskipun persenjataannya sangat sederhana.

Sebelum tentara Belanda mendarat di Madura, terlebih dahulu menyebarkan pamflet dari pesawat udara yang berbunyi "Agar Rakyat Madura menyerahkan senjatanya kepada tentara Belanda" dan "Kiamat sudah hampir datang".⁷⁸ Di samping menyebarkan pamflet Belanda juga mengerahkan armada lautnya di selatan pantai Madura disertai dengan tembakan-tembakan untuk mengintai dan menakut-nakuti agar para pejuang menyerah.⁷⁹

Walaupun rakyat dan para pejuang Madura ditakut-

⁷⁵K.H. Abd. Adim Ening, ex Lasykar Sabilillah dan Hizbullah, Wawancara, Pamekasan 10 April 1986.

⁷⁶K.H. Moh. Tamim, ex Lasykar Sabilillah, Wawancara, Pamekasan 8 April 1986.

⁷⁷K.H. Syarqawi, Ex Lasykar Sabilillah, Wawancara, Pamekasan, 9 April 1986.

⁷⁸K.H. Abd. Adhim Ening, K.H. Syarqawi dan Abd. Rahman, Loc. cit.

⁷⁹Ibid., dan Abd. Latif, Purnawirawan TNI AD, Wawancara, Pamekasan, 9 April 1986.

takuti, tetap tidak mau menyerah begitu saja, bahkan mereka semakin gigih bersemangat mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Usaha Belanda tersebut jelas tidak berhasil menundukkan pejuang pejuang Madura, maka selanjutnya Belanda dengan pasukan marinernya dan regu-regu dari Batalion Resimen Juliana mengadakan pendaratan yang pertama pada tanggal 4 Agustus 1947 di Pantai selatan Madura sebelah timur Kamal dan Tanjungan untuk menyerang Madura.⁸⁰

Pendaratan tentang Belanda tersebut disambut oleh para pejuang yang terdiri dari TNI, lasykar Hizbullah, Sabilillah dan lain-lainnya, sehingga dengan terpaksa tentara Belanda tidak langsung ke arah timur, akan tetapi menuju ke utara (Bangkalan) dengan mendapat perlindungan dan bantuan dari kapal terbang Jagers kira kira 6 buah milik Belanda dengan tujuan mengadakan serangan dari bagian utara/belakang sektor pertahanan para pejuang.⁸¹ Para pejuang dengan senjata yang tidak seimbang jika dibandingkan dengan senjata musuh mengadakan perlawanan dan berhasil menembak dua kapal terbang musuh dan jatuh di Kamal dan Gresik.⁸²

Pada tanggal 4 Agustus 1947 itu pula tentara Belanda berhasil mendarat di Camplong dan Branta Pesisir (selatan kota Pamekasan) dengan diikuti beberapa tank dan melepaskan tembakan-tembakan.⁸³ Pendaratan di Cam-

⁸⁰KODAM VIII Brawijaya, Op. cit., hal. 115.

⁸¹Soenarto Santoso, ex BPRI, Wawancara, Pamekasan 12 April 1986; dan H. Bahri Sudjono, Purnawirawan TNI AD, Wawancara, Pamekasan 12 April 1986.

⁸²A.H. Nasution, Op. cit., V, hal. 270.

⁸³Ibid., dan K.H. Abd. Adhim Ening, Loc. cit.

plong tersebut mendapat perlawanan dari para pejuang dengan peralatan yang sederhana, namun tentara Belanda dengan senjata dan peralatan yang modern serta mendapat bantuan dari kekuatan udara berhasil menembus pertahanan para pejuang.⁸⁴ Setelah pertahanan para pejuang di Camplong jebol, maka sebagian tentara Belanda melanjutkan serangannya ke Sampang dan sebagian lagi menyerang ke arah timur dengan tujuan Pamekasan.⁸⁵ Dalam hal ini K.H.Abd. Adhim Ening mengatakan "Pertahanan para pejuang di Camplong ditaklukkan pada hari itu juga (maksudnya tanggal 4 Agustus 1947) kemudian sebagian meneruskan serangannya ke Sampang dan sebagian yang lain ke timur (Pamekasan)".⁸⁶ Ketika tentara Belanda sampai di Desa Tlanakan terjadilah pertempuran yang hebat antara Belanda yang mendapat bantuan dari pasukan yang mendarat di Branta Pesisir dengan dua buah kapal laut yang membawa beberapa tank dan tentara yang berjumlah besar dengan para pejuang yang terdiri dari TNI yang dipimpin oleh Letnan II Syafi'e, BPRI yang dipimpin oleh Masdu, Hizbullah yang dipimpin oleh Amiruddin dan Sabilillah dipimpin oleh K.H.Abd. Adhim Ening.⁸⁷ Dalam hal ini Abd. Rahman mengatakan "Ketika Belanda mendarat di Branta Pesisir langsung melepaskan tembakan-tembakan dari 2 buah kapalnya dan menurunkan beberapa tank sehingga terjadi pertempuran yang hebat antara pejuang dan Belanda."⁸⁸

⁸⁴K.H.Moh. Rasyad, Lasykar Sabilillah, Wawancara, Sampang, 10 Maret 1985.

⁸⁵Ibid.

⁸⁶K.H.Abd. Adhim Ening, Loc. cit.

⁸⁷Ibid., dan R. Ehsan Zaen, ex Lasykar Hizbullah, Wawancara, Pamekasan, 13 April 1986.

⁸⁸Abd. Rahman, Loc. cit.

R. Ehsan Zaen mengatakan "Ketika terjadi pertempuran di Tlanakan, tentara Belanda menembak dari laut, darat dan udara".⁸⁹

Demikianlah pertempuran berlangsung di Desa Tlanakan antara tentara Belanda dan para pejuang sehingga menimbulkan korban satu truk dari pihak Belanda terbakar dengan penumpangnya dan hancur akibat ledakan granat yang dilemparkan oleh pejuang, sedangkan dari pihak pejuang hanya satu orang dari TNI yang diketemukan di bawah jembatan "Dingin" Desa Tlanakan dalam keadaan mati dan 5 orang dari lasykar Sabilillah luka-luka serta banyak hewan milik penduduk yang mati akibat tembakan tentara Belanda yang membabi buta. Selain itu tidak sedikit pejuang yang ditangkap dan disiksa serta ditahan oleh Belanda.⁹⁰

Pertahanan di Desa Tlanakan tidak dapat dipertahankan oleh para pejuang, akhirnya dengan hasil musyawarah Mayor Acik dari TNI dengan K.H.Abd.Adhim Ening serta pemimpin yang lain, maka pada hari Senin (malam Selasa) tanggal 4/5 Agustus 1947 para pejuang terpaksa mundur ke arah kota untuk mempertahankan kota Pamekasan dari serangan musuh.⁹¹

2. Serangan Belanda ke Kota Pamekasan

Setelah para pejuang yang terdiri dari Hizbullah, Sabilillah dan BPRI mundur ke Pamekasan dengan route Larangan Salampar, Taroan, Teja, dan terus ke Jungcang-

⁸⁹R. Ehsan Zaen, Loc. cit.

⁹⁰Abd. Adhim Ening, dan Abd. Rahman, Loc. cit.

⁹¹Ibid., Para Bekas Tentara Hizbullah, "Sejarah Perjuangan Tentara Hizbullah Batalion I Pamekasan" (Pamekasan, 2 April 1986), hal. 1.

cang bergabung dengan pasukan Sabilillah yang dipimpin oleh R. Ibrahim dan H.R. Ehsan Zaen dan pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh R. Mudhar Tamin, sedangkan TNI masuk Kota Pamekasan dari arah timur dengan route Tlanakan, Larangan Tokol, Panglegur, Nempun, Kangenan, Somedangan terus masuk Kota Pamekasan lewat Jl. Jokotole (sekarang).⁹² Dengan mundurnya para pejuang dari Tlanakan, maka tentara Belanda mengadakan pembersihan di Tlanakan dan Sekolah Rakyat (sekarang SD) dijadikan markas, dan dari sini Belanda mengadakan pengintaian dan patroli ke arah timur dengan dilindungi pesawat terbang yang berkeliling di udara.⁹³

Untuk mencegah serangan Belanda ke Kota Pamekasan, maka pada tanggal 4 Agustus 1947 (malam) atas perintah dari Komendan Resimen 33 Let. Kol Chandra Hasan yang waktu itu berada di Desa Rombasan (utara Camplong) gedung-gedung, rumah-rumah yang sekiranya dapat dimanfaatkan oleh Belanda serta gudang mesiu di Jungcangcang dibakar, demikian juga jembatan Gurem yang menghubungkan Kota Pamekasan dengan Kamal diputus oleh para pejuang.⁹⁴ Sehubungan dengan hal tersebut H.M. Saleh ketika diwawancarai mengatakan "Pada tanggal 4 Agustus 1947 (malam) banyak gedung dan rumah yang dibakar oleh para pejuang serta jembatan Garamanjeng (nama lain dari jembatan Gurem) diputus".⁹⁵

⁹²K.H. Abd. Adhim Ening dan K.H. Syarqawi, Loc. cit.

⁹³Ibid.

⁹⁴Ibid., dan K.H. Sya'rani, Ex Lasykar Sabilillah, Wawancara, Pamekasan, 14 April 1986.

⁹⁵H.M. Saleh, Ex Lasykar Sabilillah dan Ex Ketua Pengadilan Agama Kab. Pamekasan, Wawancara, Pamekasan, 9 April 1986.

Keesokan harinya tanggal 5 Agustus 1947 tentara Belanda dari Tlanakan menuju Kota Pamekasan dengan melepaskan tembakan-tembakan dan dikawal oleh beberapa tank, karena mendapat cegatan dan perlawanan dari para pejuang, terjadilah tembak-menembak antara kedua belah pihak. Akan tetapi persenjataan dan peralatan para pejuang tidak memadai, maka pertahanan pejuang di sebelah utara stasiun PJKA tidak dapat dipertahankan, akhirnya pejuang mundur. Sedangkan tentara Belanda terus menuju ke utara akan memasuki Kota Pamekasan, akan tetapi karena Jembatan Gurem yang merupakan pintu gerbang Kota Pamekasan telah diputus, maka tentara Belanda mundur ke selatan menuju stasiun PJKA dan bermarkas di sana serta dijadikan pos terdepan tentara Belanda.⁹⁶ Dengan diputusnya jembatan yang cukup panjang dan sungai yang cukup dalam tersebut, jelas Belanda tidak bisa memasuki Kota Pamekasan lewat selatan. Akhirnya Belanda menuju ke arah timur dengan route Kanginan, Medangan dan terus ke Pademawu dengan melancarkan tembakan-tembakan yang membabi buta untuk menakut-nakuti para pejuang, sehingga terjadi perlawanan di Pademawu, namun tidak sampai terjadi korban, baik dari pihak musuh maupun dari pejuang.⁹⁷ Perlawanan pejuang yang cukup sengit dan pemutusan jembatan serta penebangan pohon-pohon sepanjang route tentara Belanda tidak banyak mempengaruhi keinginan Belanda untuk menuju Kota Pamekasan. Selanjutnya tentara Belanda meneruskan serangannya dari Pademawu terus ke Pasar Pao menuju ke arah barat masuk Desa Buddagan

⁹⁶R.P.Abd. Karim Adikara, Lasykar BPRI, Wawancara, Pamekasan, 14 April 1986; dan K.H. Syarqawi, Loc. cit.

⁹⁷Ibid.

(sekarang Jl. Jokotole Pamekasan) dengan melepaskan tembakan-tembakan yang memang merupakan kebiasaan Belanda dalam memperluas wilayahnya.⁹⁸

Pada tanggal 6 Agustus 1947 itu pula tentara Belanda terus menuju ke barat, maksudnya Kota Pamekasan, ketika sampai di Pasar Baru (sekarang) termasuk Jl. Jokotole, mendapat perlawanan yang hebat dari para pejuang sehingga jatuh korban dari pihak pejuang sebanyak 3 orang dan pihak musuh 2 orang, kemudian karena persenjataan tidak seimbang, maka para pejuang mundur ke arah utara.⁹⁹ Dalam hal ini K.H. Syarqawi mengatakan : "Para pejuang mempunyai semangat yang tinggi untuk melawan agresi Belanda I di Pamekasan, akan tetapi karena peralatan yang dimiliki tidak seimbang, maka para pejuang tidak dapat membendung serangan Belanda tersebut kemudian Belanda masuk kota Pamekasan lewat dari timur pada tanggal 6 Agustus 1947".¹⁰⁰ Selanjutnya K.H. Sya'rani mengatakan "Sebelum Kota Pamekasan diduduki tentara Belanda, Pemerintah Sipil dan penduduk kota telah menyingkir ke luar kota, dan ketika tentara Belanda masuk Kota Pamekasan para pejuang terutama TNI mundur ke utara, yaitu ke Desa Kolpajung dengan maksud akan melancarkan serangan dan pengacauan ke dalam kota".¹⁰¹ Sedangkan pejuang yang lain terutama Sabilillah dan Hizbullah mundur ke arah barat yaitu Tanah Celleng, Larangan Badung dengan membuat rintangan-rintangan dan pe-

⁹⁸ Sunarto Santoso, dan R.P. Abd. Karim Adikara, Loc. cit.

⁹⁹ Ibid., dan K.H. Sya'rani, Loc. cit.

¹⁰⁰ K.H. Syarqawi, Loc. cit.

¹⁰¹ K.H. Sya'rani, Loc. cit.

nebangan pohon di pinggir-pinggir jalan dari Tononggul, Bungcangka ke jurusan Palakpak agar Belanda tidak mudah meneruskan serangannya ke arah barat laut Kota Pamekasan.¹⁰²

Dengan taktik para pejuang tersebut, maka usaha Belanda untuk mempercepat penaklukan daerah Pamekasan tidak berhasil, sehingga Belanda tetap bertahan di dalam kota dengan sering mendapat gangguan dari para pejuang.

¹⁰²Abd. Lathif, Loc. cit., dan Para Bekas Tentara Hizbullah, "Sejarah Perjuangan Tentara Hizbullah Batalion I Pamekasan", Loc. cit.